

Pengamanan Pilkades Serentak 152 Desa di Bekasi JADI OBYEK STUDI BANDING

Ingin tahu model pengamanan Pilkades serentak se-kabupaten? Jawabnya bisa ke Polres Bekasi. Ya, karena Polres Bekasi telah berhasil mengamankan Pilkades serentak di 152 desa se-Kabupaten Bekasi. Model pengamanan itu, kini jadi obyek studi banding dan model percontohan. Terutama bagi Polres lain yang berniat menyelenggarakan model pengamanan serupa.

MENGGELAR Pilkades secara serentak bukanlah tanpa resiko. Menakar beratnya, memang cukup besar. Sebab, pesta demokrasi ini berlangsung di masyarakat akar rumput. Bila terjadi suatu masalah, bisa saja antar pendukung calon kades bentrok. Tidak tertutup pula kemungkinan terjadi bentrok antar saudara. Bahkan perusakan-perusakan fasilitas umum seperti balai desa dan sebagainya.

Kapolres Bekasi, AKBP Drs. Purwadi Ariyanto mengungkapkan, ketimbang Pilpres (Pemilihan Presiden) dan Pemilu legislatif, pengamanan Pilkades serentak ini resikonya jauh lebih berat. Sebab, dalam Pilkades biasanya pendukung calon menunggu langsung suara hingga selesai sore hari. Diperkirakan pula, bila muncul ketidakpuasan dari pendu-

kung calon yang kalah, maka bisa terjadi bentrok.

Lain dengan Pilpres dan Pemilu Legislatif, begitu mencoblos, masyarakat langsung pulang. "Oleh karena itu, Pak Kapolda (Irijen Pol. Adang Firman) menegaskan, meskipun ini Pilkades, tapi polisi jangan ambil resiko, dan harus menjadi atensi," kata Kapolres menirukan arahan Kapolda.

PERENCANAAN MATANG

Suksesnya pengamanan Pilkades serentak ini boleh dikata karena kegiatan ini telah dirancang dan direncanakan secara matang oleh instansi terkait. Baik oleh pihak panitia pemilihan di tingkat desa, Pemkab Bekasi dan pihak pengamanan. Setiap permasalahan dibicarakan dengan baik. Sehingga bila terjadi permasalahan dapat diselesaikan dengan baik.

Sebelumnya, Kapolres juga telah membuat analisis perkiraan ancaman pada Pilkades serentak. Secara garis besar, ancaman itu bisa muncul pada saat seleksi bakal calon kades, penetapan bakal calon kades dan penetapan daftar pemilihan. Kemudian bisa muncul pula pada saat kampanye, pemungutan suara, penghitungan suara, penetapan pemenang hingga pelantikan Kades terpilih.

"Gangguan yang diperkirakan muncul pada saat seleksi bakal calon antara lain terjadinya suap, pemalsuan surat-surat/ ijasah dan terjadinya teror terhadap anggota panitia. Sedangkan perkiraan kerawanan pada saat penetapan bakal calon seperti penolakan tanda tangan oleh bakal calon yang tidak lolos seleksi. Kemudian peng-erahan massa untuk men-eror panitia seleksi dan keluarganya maupun keluarga balon yang lolos seleksi, hingga pencuikan



terhadap panitia maupun bakal calon yang dinyatakan lulus," jelas Purwadi.

Kerawanan selanjutnya, menurut Kapolres, bisa terjadi pada tahap pendaftaran pemilih. Yaitu munculnya KTP rangkap, pemalsuan umur pemilih dan pemilih tidak terdaftar. "Yang tidak kalah gawatnya adalah perkiraan kerawanan pada saat kampanye. Yaitu berupa perusakan gambar calon lain, intimidasi, *money politic*, bentrok antar pendukung, dan kampanye tanpa ijin. Kemudian kampanye tidak sesuai ketentuan maupun provokator untuk tidak gunakan hak pilih," terangnya.

Apalagi pada saat perhitungan suara, ancaman kerawanan bisa meningkat lagi. Misal, penghadangan surat suara, merusak dan membakar TPS, mencuri/memalsu dan robek surat suara, pemilih rangkap. Ketidakterdatangan petugas dan saksi di TPS juga bisa menimbulkan kerawanan pada saat pemungutan suara. Apalagi bila ada kekuranganengkapan sarana Pilkades dan dikompromi oleh provokator," tambahnya.

Hingga di sini, perkiraan ancaman kerawanan belum berakhir. Saat penghitungan suara biasanya menjadi saat-saat menegangkan. Kerawanan yang diperkirakan muncul pada saat perhitungan suara adalah komplain kartu suara tidak sah, keberatan saksi, manipulasi suara dan bila terjadi penghitungan ulang. Kemudian bila massa tidak puas sehingga melakukan keributan dengan merebut, merusak, membakar dan menganiaya petugas. Apalagi bila sampai terjadi penghadangan dalam pengiriman kotak berisi hasil perhitungan suara dan berita acaranya.

Kerawanan terakhir adalah pada saat penetapan pemenang Pilkades. Diperkirakan, pada tahap ini akan terjadi pengerahan massa untuk menolak pemenang. Selain itu juga perusakan kantor desa, penculikan calon terpilih, penganiayaan petugas, dan bahkan bentrok antar pendukung calon. "Semua kerawanan tersebut kita antisipasi dengan



mempersiapkan langkah-langkah penanggulangannya," tandas alumni Akpol 1986 ini.

BANTUAN PASUKAN

Berdasarkan perkiraan ancaman yang terjadi itu, maka Kapolres mempersiapkan langkah-langkah pengamanan. Mengingat personil Polres Bekasi terbatas yaitu hanya 1.245 personil, tentu saja membutuhkan pasukan tambahan. Kapolda lalu mendukung dengan mem-BKO-kan personil dari Polda Metro Jaya dan Polres-Polres perbatasan. "Sehingga dalam pengamanan Pilkades serentak di 152 desa di Kabupaten Bekasi, kami mengerahkan kekuatan pasukan sebanyak 3.128 personil," katanya.

Setiap Tempat Pemungutan Suara (TPS) diamankan oleh 17 personil. Mereka dibagi tugas. Ada yang mengawal calon, pengamanan lokasi dan lainnya melakukan patroli.

Untuk mewujudkan Pilkades demokratis, Kapolres menegaskan kepada anggota harus netral, tidak berpihak. Mengutamakan upaya pencegahan (*preentif*) dan preventif. Mengedepankan tugas pelayanan, perlindungan dan pengayoman serta penegakan hukum guna

mendukung terciptanya kamtibmas yang kondusif.

"Dengan semangat proaktif, *partnership*, problem solving, maka setiap dinamika Pilkades dan permasalahannya dapat diselesaikan dengan baik. Memang sempat muncul kasus perusakan rumah salah seorang pendukung calon. Tapi pelakunya ditangkap dan ditindak tegas. Awalnya dijadikan masalah hukum. Namun karena dapat diselesaikan secara damai di tingkat Polsek, maka tidak berlarut-larut," jelasnya.

Sampai dengan pelantikan Kades terpilih, tidak ada gangguan berarti. "Tentunya ini berkat dukungan kesiapan pasukan. Saya bangga mendapat dukungan begitu besar dari Kapolda Metro Jaya dan jajaran Polres lain yang turut mendukung memberikan personilnya untuk BKO. Karena itu saya sampaikan terima kasih kepada jajaran Polres di DKI yang telah mendukung secara moril dan materiil," tuturnya.

Atas keberhasilan ini, Kapolres menyebutkan sedikitnya sudah ada delapan wilayah (Polres) yang melakukan studi banding ke Polres Bekasi.

[rus/bud]